

ABSTRAK

Judul : Konseptualisasi Pengaturan Pengambilalihan Kewenangan Yang Partisipatif
Penulis : Muhammad Addi Fauzani
Instansi : Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Tahun Terbit : 2025
Jumlah Halaman : 14 hlm
Asal Literatur : e-jurnal.peraturan.go.id
Teks Lengkap : [PDF Artikel Hukum - Konseptualisasi Pengaturan Pengambilalihan Kewenangan Yang Partisipatif](#)

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, membuktikan bahwa ketentuan sanksi administratif pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah telah meresentralisasi kekuasaan sehingga melanggar prinsip otonomi daerah dan partisipasi publik; kedua, menganalisis konseptualisasi pengaturan pengambilalihan kewenangan yang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, ketentuan sanksi administratif pengambilalihan kewenangan secara langsung mengatur mengenai pengambilalihan kewenangan pelayanan perizinan berusaha tanpa didahului oleh instrumen lain yang lebih persuasif sehingga mekanismenya bersifat represif. Bentuk mekanisme tersebut telah melanggar prinsip otonomi daerah dan partisipasi publik karena berupaya meresentralisasi kekuasaan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha. Kedua, ketentuan sanksi administratif pengambilalihan kewenangan pelayanan perizinan berusaha tanpa didahului oleh instrumen lain di dalam PP 6 Tahun 2021 dan PP 12 Tahun 2017 harus diganti. Kebijakan hukum pengawasan dan pembinaan dapat dikonseptualisasi dalam pengaturan.